

BAB III**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD****3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi****Pelayanan Satpol PP.**

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam penyelenggaraan kebijakan penegakan Perda dan/atau Perwa, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagai berikut :

- a. Keterbatasan anggaran yang ditetapkan sehingga optimalisasi pelaksanaan program maupun kegiatan tidak terlaksana dengan baik yang mempengaruhi pencapaian target kinerja.
- b. Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mempengaruhi kinerja Satpol PP.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP.
- d. Tingkat kedisiplinan aparatur Satpol PP baik PNS maupun Non PNS.
- e. Kurangnya sinergitas antar instansi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP di lapangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Satpol PP.

Visi merupakan arah pandangan sebuah organisasi dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai secara konsisten, inovatif, dan produktif sehingga peran menentukan visi menjadi penting dalam rangka menunjukkan kinerja dan kerja.

Penentuan visi Satuan Polisi Pamong Praja disamakan dengan visi Pemerintah Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan periode tahun 2016-2021, sehingga visi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi **“Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius.”**

Dari pernyataan visi terdapat beberapa kata kunci yang memiliki masing-masing pengertian, antara lain kata *Unggul* : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, berbasis Industri Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga. Selanjutnya kata *Nyaman* : Tercipta suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan dan ramah bagi kehidupan Masyarakat. Dan yang terakhir kata *Religius* : Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sesuai dengan RPJMD Perubahan periode tahun 2016-2021 adalah masuk pada **Misi Ke-Satu** yakni **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.”**

Misi tersebut mengandung makna bahwa kualitas pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang positif dari masyarakat (publik) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara profesional dan transparan yang mengarah kepada perwujudan Kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius.

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok oleh 6 (enam) Program, antara lain :

1. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan.

Indikator dari program ini adalah “Predikat SAKIP” dengan kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja. Penetapan indikator tersebut menuntut Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan pencapaiannya secara akuntabel.

2. Peningkatan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Indikator dari program ini memiliki 2 (dua) indikator yakni “Cakupan penegakan Perda dan Perwal” dan “Cakupan Rasio Petugas Linmas.” Kedua indikator ini merupakan alat ukur dari sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum, dengan kegiatannya antara lain :

- Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM.
- Penertiban PKL.
- Penertiban Perizinan.
- Penertiban Bangunan Liar di lahan Fasos Fasum milik Pemerintah Kota Depok.
- Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng.
- Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban.
- Penjagaan/Pengamanan dan Pengawasan Lingkup Pemerintah Kota Depok.
- Pengamanan Hari Raya.
- Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol.
- Pengawasan dan Pemetaan titik/lokasi rawan Tranmastibum.
- Konsolidasi Satpol PP dengan Instansi terkait dalam rangka pemeliharaan Ketertiban Umum.
- Monitoring dan Evaluasi Pra-Pasca Penegakan Perda.
- Penyediaan Jasa Piket.
- Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum.
- Pengadaan Papan Larangan/Segel.
- Penertiban dan Operasi Penegakan Perda tentang Ketertiban Umum (Sidang Tipiring).

- Pengawasan dan Penertiban Pelajar.
- Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan).
- Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti).
- Pengendalian dan Pemantauan Lokasi Rawan Gangguan Keamanan dan Lokasi Rawan Bencana (Linmas).
- Pengawasan dan Penertiban Kawasan Tanpa Rokok.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur .

Indikator dari program ini adalah “Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi” dengan kegiatan antara lain :

- Pendidikan dan Pelatihan Intelijen bidang khusus Satpol PP.
- Pendidikan dan Pelatihan Linmas

4. Peningkatan Administrasi Perkantoran.

Indikator dari program ini adalah “Persentase penyediaan administrasi perkantoran” dengan kegiatan antara lain :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Penyediaan Makanan Dan Minuman.
- Penyediaan Sarana Informasi.
- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Indikator dari program ini adalah “Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparaturnya” dengan kegiatan antara lain :

- Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor.
- Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya.
- Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya.

- Pengadaan Pakaian Linmas dan Perlengkapannya.
- Penyediaan Asuransi Keselamatan Kerja Satpol PP.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penertiban.
- Pembuatan Kartu Tanda Anggota Satlinmas.
- Pengadaan Handy Talky dan Repiter (Satlinmas).
- Pengadaan Kendaraan Operasional Satpol PP (Roda Dua).
- Pengadaan Kendaraan Drum Truck (Roda Enam).
- Pengadaan Kendaraan Alat Berat.

6. Peningkatan Kualitas Perencanaan.

Indikator dari program ini adalah “Cakupan integrasi perencanaan” dengan kegiatan Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Sesuai dengan analisa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja melalui program dan kegiatan yang dijalankan, permasalahan-permasalahan tersebut dijadikan isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Kurang optimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota.
2. Masih lemahnya kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
4. Kurang optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota.
6. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan pada setiap bidang.